

Efisiensi Belanja Daerah Dan Cointegrasi Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Irfan*¹, Nabilatul Jannah¹, Isthafan Najmi², Cut Delsie Hasrina², Yuni Ayu Safitri²

¹STIE Lhokseumawe

²Universitas Abulyatama

*Email korespondensi: irfan@stie-lhokseumawe.ac.id

Diterima Februari 2023; Disetujui 28 Maret 2023; Dipublikasi 31 April 2023

Abstract: The purpose of this study was to determine the efficiency level of the Special Autonomy profit sharing fund, tax sharing and social assistance spending and its effect on poverty rates in 23 districts/cities in Aceh Province. The sample for this study uses combined data from regions (districts/cities) and the time period from 2015-2020. Methods This study uses two analytical approaches, namely Data Envelopment Analysis (DEA) to measure output efficiency with return to scale variables and Panel Regression using the Random Effects approach to see its effect on poverty. From the results of the research, there were only six districts that were efficient in terms of aid spending, social assistance or 26 percent while the remaining 74 percent of urban districts are not yet efficient in terms of using public spending on social assistance in the province of Aceh, then the results of the random effect panel regression of the social assistance program (PKH) and the human development index (IPM) have a negative and significant effect on the level of poverty in Aceh province.

Keywords: Special Autonomy Revenue Sharing Fund, Tax revenue sharing, PKH, HDI, and poverty

Abstrak: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi Dana bagi hasil otsus, bagi hasil pajak dan belanja bantuan sosial dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sampel penelitian ini menggunakan data gabungan daerah (kabupaten/kota) dan kurun waktu dari tahun 2016-2021. Metode Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis yaitu Data Envelopment Analisis (DEA) untuk mengukur efisiensi output dengan variable return to scale dan Regresi Panel menggunakan pendekatan Random Effect untuk melihat pengaruhnya terhadap kemiskinan, dari hasil penelitian hanya terdapat enam kabupaten yang efisien dalam hal belanja bantuan sosial atau 26 persen dari semua kabupaten/kota yang ada sedangkan sisanya sebagian besar 74 persen kabupaten kota belum efisien dalam hal penggunaan belanja public bantuan sosial di provinsi Aceh, kemudian hasil regresi panel random effect program bantuan sosial (PKH) dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

Keywords: Dana Bagi Hasil Otsus, Dana bagi hasil Pajak, Bantuan PKH, IPM, dan kemiskinan

Selama tiga tahun belakangan ini Provinsi Aceh merupakan provinsi yang mempunyai persentase penduduk miskin

tertinggi di pulau Sumatera dengan persentase penduduk miskin rata-rata 15,21 persen. Diurutan kedua adalah Provinsi Bengkulu

dengan rata-rata persentase penduduk miskin 15,15 persen. Dan diurutan ketiga adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata persentase penduduk miskin 13,54 persen. Adapun penyebab terjadinya peningkatan angka kemiskinan di provinsi Aceh salah satunya adalah peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan dampak adanya pandemi covid 19, Dalam satu semester terakhir

persentase penduduk miskin di daerah pedesaan maupun perkotaan mengalami kenaikan. “Di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0,47 poin dari 9,84 persen menjadi 10,31 persen. Sebaliknya di wilayah pedesaan jumlahnya meningkat 0,50 poin ataupun sebelumnya 17,46 persen menjadi 17,96 persen” (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2020-2022 (semester)

Provinsi	2020		2021		2022	Rata-rata
ACEH	15.32	15.01	14.99	15.43	15.33	15.21
Sumatera Utara	8.83	8.86	8.75	9.14	9.01	8.91
Sumatera Barat	6.42	6.29	6.28	6.56	6.63	6.98
Riau	8.42	8.82	7.98	7.67	7.78	8.01
Jambi	8.86	9.12	8.41	8.37	8.19	8.48
Sumatera Selatan	14.25	13.77	13.54	13.39	13.19	13.54
Bengkulu	15.32	14.91	15.03	15.30	15.22	15.15
Lampung	12.62	12.30	12.34	12.76	12.62	12.52
Kep.Bangka Belitung	5.4	4.83	5.22	5.04	5.2	5.17
Kep. Riau	6.24	5.78	5.98	5.84	6.06	6.01

Sumber: BPS (badan Pusat Statistik), 2022 (diolah)

Hal ini tentu menjadi isu yang menarik mengingat provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerima dana otonomi khusus sejak 2008 hingga 2015 dan seterusnya sampai dengan tahun 2029, Aceh telah menerima dana otonomi khusus senilai Rp 41,49 triliun. Dana otonomi khusus menjadi sumber penerimaan utama untuk pembangunan ekonomi Aceh, dengan rata-rata kenaikan penerimaan 11 persen per tahun. Dari APBA 2015 yang berjumlah Rp12,7 triliun, lebih dari sebagiannya bersumber dari dana Otsus (PPKD, 2015). Dari sisi lainnya penerimaan dana otsus yang besar tersebut apabila dikaitkan dengan upaya pemerintah daerah dalam hal mengatasi kemiskinan yang ada di provinsi Aceh masih belum optimal hal ini tercermin dari salah satu kebijakan public yaitu belanja bantuan sosial program keluarga Harapan (PKH), belanja bantuan sosial merupakan salah satu instrument penting dikarenakan belanja public bidang sosial sangat efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di provinsi Aceh, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan di Turki menggunakan pendekatan analisis jangka Panjang dengan 26 wilayah menemukan hubungan negative jangka pendek dan jangka Panjang antara belanja daerah bidang Pendidikan terhadap tingkat kemiskinannya

(Celikay & Gumus, 2017)

Namun demikian dampak pemberian bantuan sosial tidak serta merta berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan menurut penelitian (Sánchez & Navarro, 2021). Pertumbuhan ekonomi dan belanja bantuan sosial tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan (Cammeraat, 2020). Berdasarkan dari pemikiran tersebut, Adapun tujuan penelitian ini mencoba untuk melihat secara lebih komprehensif mengenai kabupaten kota mana yang telah efisien dari segi belanja daerah program keluarga harapan (PKH), dan indeks pembangunan manusia yang baik dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di 23 kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh. Perbedaan dari tulisan ini adalah dan belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya (Ahmad Danu Prasetyo^{a,b}, Ubaidillah Zuhdi^{a,c}, Bo Lia^b, Hasnat Dewanc dan Giovanna D'Inverno). Dari hasil kabupaten Dari kota yang efisien dalam hal pengelolaan belanja daerah dan indeks pembangunan manusia yg berkelanjutan maka akan di uji dan dianalisis kembali dampaknya terhadap tingkat kemiskinan secara panel di kabupaten kota dalam provinsi Aceh tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian sebelumnya telah

mengkaji hubungan antara pendapatan dan pengeluaran anggaran publik terhadap tingkat kemiskinan (Dana et al., 2020) “menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otsus terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh 2010-2017”. Hasil Kajian Sebagian pendapatan asli daerah dan dana otsus tidak berdampak pada kemiskinan di Provinsi Aceh, dana alokasi umum mempengaruhi kemiskinan di Pemerintah Provinsi Aceh. Bersamaan dengan itu, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus mempengaruhi kemiskinan di Pemerintah Provinsi Aceh. Hal ini senada dengan tulisan sebelumnya (Taruno, 2019). Dengan memakai data panel berasal 31 provinsi dalam periode 2009-2018, memakai dua persamaan regresi buat menganalisa pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pengurangan kemiskinan, baik dipertanian maupun perdesaan. output ini menjelaskan bahwa pengeluaran publik untuk sektor kesehatan serta pendidikan memiliki pengaruh yang sedikit berbeda terhadap pengurangan kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan.

(D’Inverno et al., 2018) Efisiensi pengeluaran public di kotamadya tuscan, Hasil yang diperoleh melalui analisis DEA dan divalidasi oleh regresi Tobit tampak konsisten dan bisa menjadi titik awal untuk realokasi pengeluaran kota yang tidak efisien. Secara khusus, ukuran kota benar-benar mempengaruhi efisiensi pengeluaran public. Hal ini didukung oleh (Li & Dewan, 2017) Berdasarkan data 2012 dari 116 kota berbasis sumber daya di China yang menganalisis perbedaan tingkat efisiensi di antara kota-kota, dan menemukan determinan utama mereka. Pertama, sebagian besar kota berbasis sumber daya di Cina adalah energi faktor total (TFE) tidak efisien. Kedua, adanya kontribusi industri jasa terhadap PDB lokal, dan ukuran kabupaten yang dibangun di kota menghasilkan tiga determinan utama dengan efek positif yang signifikan terhadap efisiensi. Di sisi lain, belanja konsumen, belanja pemerintah daerah, dan ketersediaan sekolah kejuruan adalah tiga faktor penentu utama dengan efek negatif yang signifikan pada efisiensi. Ketiga, enam faktor penentu menyumbang 79% dari perbedaan efisiensi di antara kota-kota. Namun, kontribusi faktor-faktor terhadap efisiensi TFE sangat bervariasi. Keempat, efek dari determinan pada efisiensi TFE berubah dengan tingkat efisiensi kota.

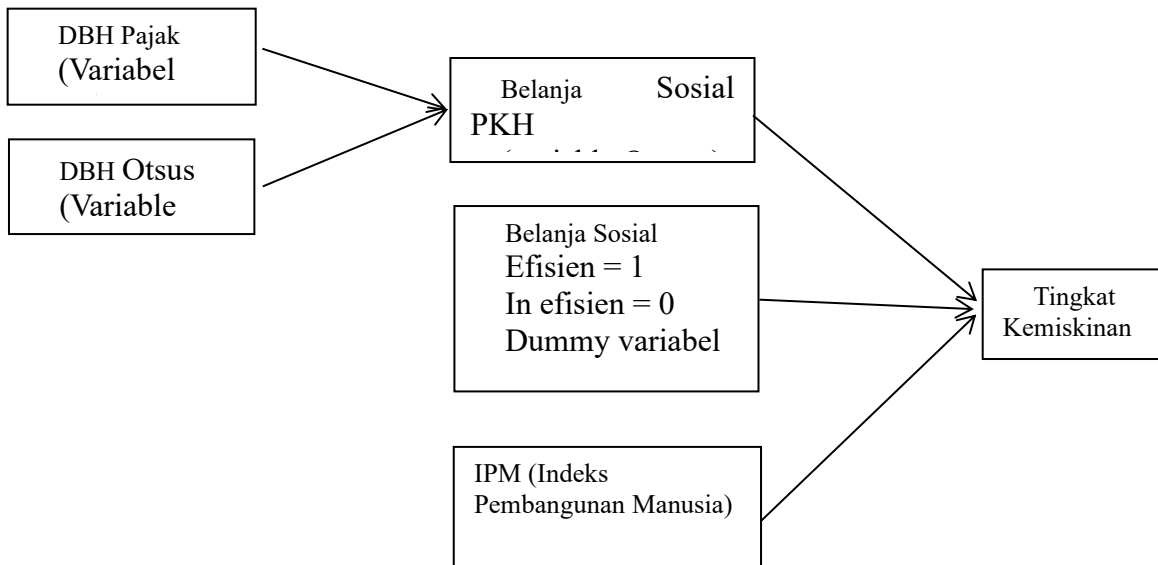
(Juliansyah et al., 2019). Mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi, metode klasik tipologi Indeks Williamson dan Indeks Theil diadopsi. Sementara itu, regresi berganda panel digunakan untuk menyelidiki pengaruh kemiskinan dan pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. hasil penelitian bahwa tingkat kemiskinan tidak mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi, sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menyiratkan bahwa untuk lebih mengurangi ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di seluruh kabupaten, pemerintah harus mendistribusikan pendapatan yang adil sehingga semua warga negara dapat menikmatinya secara merata.

(Prasetyo & Zuhdi, 2013) “Dalam makalah ini, menyelidiki tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah per kapita di sektor kesehatan dan pendidikan dan transfer dan subsidi di 81 negara terhadap pembangunan manusia di negara masing-masing dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) selama 2006-2010”. Kami menemukan ada negara yang selalu diposisikan di perbatasan efisien selama periode sampel, yaitu: Armenia, Australia, Bangladesh, Chili, Georgia, Jepang, Republik Korea, Laos, Madagaskar, Niger, Norwegia, Filipina, Sierra Leone, Singapura, AS, dan Zambia. Namun demikian, hanya Singapura dan Zambia yang berhasil mempertahankan perbaikan positif di antara negara-negara yang terdaftar di perbatasan yang efisien.

(Yanti & Kustiani, 2016) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Urusan Kesehatan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Output penelitian ini memperlihatkan bahwa Tangerang dan Cilegon memiliki efisiensi tertinggi serta kabupaten Tangerang wajib menaikkan jumlah output antara serta output akhir untuk menaikkan efisiensi belanja Kesehatan. Metode DEA bisa digunakan oleh pemerintah untuk membangun iklim anggaran yang efisien dalam bidang pelayanan pemerintah. Hasil serupa dengan (Paper, 2016)) Hasil analisis efisiensi dari 3 wilayah kabupaten/kota yang dijadikan sampel penelitian hanya Kota Banda Aceh yang efisien secara teknis dan skala, Kabupaten Pidie efisien menurut teknis tetapi tidak efisien menurut skala, sedangkan Kabupaten Pidie Jaya tidak

efisien menurut teknis dan skala. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh, dalam pengalihan PBB sebagai pajak daerah sudah

efisien untuk meningkatkan pendapatan daerah.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan data gabungan (panel) dari semua kabupaten kota dalam provinsi aceh yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, setiap kabupaten/kota yang menjadi obyek penelitian dinamakan dengan *Decision Making Unit* (DMU). Dalam beberapa penelitian istilah DMU dikenal juga dengan nama Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Kemudian sumber data selanjutnya adalah data runtun waktu yang diperoleh dari beberapa instansi yang terkait dengan penelitian ini, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas sosial, dan Bappeda Aceh dari tahun 2016-2021

Model analisa pertama yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisa statistik non parametrik, dengan menggunakan pendekatan DEA (*Data Envelopment Analysis*). Pertimbangan dipilihnya pendekatan DEA ini adalah bahwa pendekatan ini mampu mengakomodasi banyak input dan output dalam perhitungan model program linearnya untuk menghasilkan nilai tunggal efisiensi bagi setiap observasi. Dengan menggunakan DEA, penelitian ini juga bisa menjawab seberapa efisien setiap DMU (masing-masing kabupaten dan kota) dalam mengalokasikan belanja daerah program keluarga harapan yang menjadi variabel outputnya, sedangkan variable input adalah DBH Otsus dan DBH Pajak, apabila dalam

perhitungannya tidak efisien, maka program ini juga mampu untuk menjawab berapa nilai yang dibutuhkan untuk menjadikanya efisien.

“Model Variable Return to Scale (VRS) dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Cooper. (model BCC) pada tahun 1984 yang merupakan pengembangan dari model CCR. Model ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. Batasan dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan input dan Output tidak sama (variable return to scale). Artinya, penambahan input sebesar x kali tidak akan menyebabkan Output meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x kali. Rumus variable return to scale (VRS) dapat dituliskan dengan program matematika seperti berikut ini” (Masita, 2015):

$$\sum_{j=1}^n = 1$$

Selanjutnya model BCC dapat ditulis dengan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Max (Efisiensi DMU Model VRS)} \\ & \sum_j^n 1x_{ij} \quad 'ij \geq x_i \quad 0 \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & \sum_j^n 1y_{rj} \quad 'j \geq y_r \quad 0 \quad r = 1, 2, \dots, j \end{aligned}$$

$$\sum_j^n 1 'j \geq 1 \quad (\text{VRS})$$

$$\sum_j^n 1 'j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

- θ = efisiensi teknis (VRS)
- N = jumlah DMU
- M = jumlah *input* (DBH pajak, DBH Otsus)
- s = jumlah *output* (Belanja Daerah PKH)
- x_{ij} = jumlah *input* ke-i dari DMU ke-j
- yr_j = jumlah *output* ke-r dari DMU ke-j
- $'j$ = bobot DMU j untuk DMU yang dihitung

Model Panel Analisis

Tahapan selanjutnya menggunakan pendekatan model panel analisis yang merupakan kombinasi dari *cross section* (i) dan *time series* (t) Dalam mengestimasi data panel melalui pendekatan FEM, variable dummy menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan variabel residual yang dikenal dengan

pendekatan random effect model (REM). Ide dasar dari REM adalah mengasumsikan error bersifat random. REM diestimasi dengan metode Generalized Least Square (GLS) (Astuti, 2010)

$$Y_{i,t} = a_0 + b_0X_{i,t-1} + b_jX_{i,t-q} + b_0DM_{i,t} + e$$

Dimana : $Y_{i,t}$ = Angka Kemiskinan
 $X_{i,t}$ = Belanja PKH, IPM
 $DM_{i,t}$ = Dummy Efisien (1) dan tidak efisien (0)
 e = Standar error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil output dari model analisis pertama menggunakan program DEA, dan menggunakan bantuan software DEAP *version*2.1, dimana perhitungan menggunakan VRS (*Variable Return To Scale*) yang berorientasi pada pendekatan output. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi menggunakan DEA, tingkat efisiensi 23 Kabupaten Kota dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Technical Efficiency DEA

Sekor Efisiensi DEA		
DMU	Efisien	Non Efisien
Simeulue		0.38
Aceh Singkil		0.25
Aceh Selatan		0.36
Aceh Tenggara		0.85
Aceh Timur		0.67
Aceh Tengah		0.22
Aceh Barat		0.25
Aceh Besar		0.66
Pidie	1	
Bireuen	1	
Aceh Utara	1	
Aceh Barat Daya		0.54
Gayo Luwes		0.36
Aceh Tamiang		0.41
Nagan Raya		0.17
Aceh Jaya	1	
Bener Meriah	1	
Pidie Jaya	1	
Banda Aceh		0.16
Sabang		0.16
Langsa		0.16
Lhokseumawe		0.22
Subulussalam		0.42

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Dari Hasil tabel output diatas maka dapat dilihat dari 23 kabupaten dan kota yang ada di provinsi aceh selama priode tahun 2021 menghasilkan enam output kabupaten yang efisien dalam hal belanja bantuan social (PKH)

atau dengan kata lain baru 26 persen daerah yang dikatagorikan baik (efisien) dari segi output dalam hal pengalokasian dana bantuan sosial (PKH) tersebut yaitu kabupaten Pidie, Bireun, Aceh utara, Aceh Jaya, Bener meriah

dan Pidie jaya. Sedangkan sisanya 74 persen daerah kabupaten/kota masih tidak efisien dalam hal pengeluaran bantuan sosial (PKH) hal ini tentu menjadi catatan penting mengingat masih terlalu banyak kabupaten kota yang tidak efisien dalam hal pengalokasian dana bantuan sosial pkh yang berdampak sistematis terhadap kebijakan fiskal di daerah tersebut terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. menurut (Frenda et al., 2021) Pengeluaran daerah untuk perlindungan sosial merupakan komponen fundamental dari kesejahteraan individu. hal ini justru ditujukan untuk menilai kesejahteraan

individu dalam hal efisiensi biaya teknis di Wilayah Italia. Hal ini sesuai dengan penelitian (Cristóbal et al., 2021) Di sisi lain, ditunjukkan bahwa negara berpenghasilan rendah dan negara berpenghasilan tinggi menghasilkan efisiensi belanja publik rata-rata yang lebih tinggi. Negara-negara dari kedua kelompok ini lebih sering dianggap efisien, ditampilkan di samping perbatasan DEA yang efisien. Temuan ini menyoroti bahwa negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah dan berpenghasilan menengah ke atas menunjukkan ruang besar untuk perbaikan dalam belanja publik.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Pooled Regression Model, Fixed Effect, Random Effect

Pooled Regression					
Variabel	Coefficient	Std.error	t-statistic	Prob	Obs
c	67.19556	7.526291	8.92811	0	115
Log (danaPKH)	-0.701076	0.269011	-2.606121	0.0104	115
IPM	-0.498024	0.05303	-9.391325	0	115
DMY	2.801176	0.593645	4.718603	0	115
Fixed Effect					
Variabel	Coefficient	Std.error	t-statistic	Prob	Obs
c	49.14012	6.533412	7.521357	0	115
Log (danaPKH)	-0.929286	0.19223	-4.834252	0	115
IPM	-0.154126	0.152057	-1.013608	0.3135	115
DMY	2.801176	0.593645	4.718603	0	115
Random Effect					
Variabel	Coefficient	Std.error	t-statistic	Prob	Obs
c	56.98561	4.319277	13.19332	0	115
Log (danaPKH)	-0.683673	0.127698	-5.353836	0	115
IPM	-0.358496	0.094921	-3.77679	0.0003	115
DMY	2.758483	1.346853	2.048095	0.0429	115

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Dari hasil tabel output 2 diatas dengan menggunakan tiga pendekatan panel analisis maka diperoleh hasil yang berbeda-beda dari setiap regresi dengan pendekatan Pooled regresi maka diperoleh hasil yang signifikan dan berpengaruh negative dari semua variable bebas sedangkan variable dummy menjelaskan ada adanya perbedaan dari kabupaten yang efisien dalam belanja daerah (PKH) sebesar 2,75 poin dibandingkan kabupaten/kota yang tidak efisien dalam hal belanja daerah (PKH).

Untuk langkah selanjutnya pemilihan

model terbaik antara fixed effect dan random effect maka dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausmant dalam memilih antara model efek tetap dan model efek acak. Dalam hal ini, hipotesis nol akan menyiratkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perkiraan model efek tetap dan model efek acak. Jika hipotesis nol ditolak, model efek tetap harus dipilih. Jika tidak, model efek acak akan dianggap lebih memadai. Tabel 3 menunjukkan output dari tes ini.

Tabel 3 The Hausman Test

Test Summary		Chi-Sq. d.f.	Prob.		
Cross-section random	3.118518	2	0.2103		
	Fixed	Random	Var (Diff.)	Prob.	Obs
LOG(DANAPKH)	-0.929286	-0.683673	0.020645	0.0874	115
IPM	-0.154126	-0.358496	0.014111	0.0854	115

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Dari Hasil Output diatas maka nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 atau sebesar 0.21 karena itu hipotesis nol tidak ditolak dan dapat disimpulkan model random effect lebih tepat dalam penelitian ini. Dari hasil output tersebut secara teori dan statistic bahwasannya pengeluaran pemerintah (PKH) berdampak negative terhadap tingkat kemiskinan -0.68% dan signifikan hal ini sesuai dengan penelitian (YU & LI, 2021) yang menunjukkan bahwa pengeluaran jaminan sosial elastisitas terhadap tingkat kemiskinan pedesaan adalah -0,2255, yang menunjukkan bahwa pengeluaran jaminan sosial membantu mengurangi kemiskinan absolut pedesaan. Berdasarkan temuan-temuan ini, implikasi kebijakan dapat mendorong banyak pengeluaran jaminan sosial dan sistem jaminan sosial yang lebih adil. Ini akan menjadi salah satu strategi anti-kemiskinan utama setelah tahun 2020 di Cina mengurangi kemiskinan absolut. (Ilkharacan et al., 2021) menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan pengeluaran sosial tidak hanya berpotensi menghasilkan sejumlah besar pekerjaan dengan cara yang seimbang gender, tetapi juga membantu mengurangi kemiskinan antar waktu dan pendapatan serta meningkatkan kesetaraan gender.

Dan indeks pembangunan manusia juga berpengaruh negative -0.15 terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh dan juga signifikan secara statistic hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Bariyah, Nurul, 2020) Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan model *fixed effect cross section-weights* (EGLS). Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh

kesehatan, pendidikan dan daya beli terhadap tingkat kemiskinan berdampak negatif dan penting. Artinya, kenaikan variabel ini, akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, Sebaliknya pengangguran berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. (Cheng et al., 2021) peningkatan pendidikan dan kemampuan tenaga kerja, penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk pengurangan kemiskinan yang efektif. (Amaluddin et al., 2018) Kinerja pembangunan manusia yang dimodifikasi memiliki peran penting bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa. Tulisan ini juga mengungkapkan studi empiris bahwa indikator indeks pembangunan manusia berdampak negatif serta berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. (Reza et al., 2018) berdasarkan Indeks ad-dien menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, berdasarkan Indeks an-nafs menunjukkan bahwa harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, berdasarkan Indeks al-nafs -'aql menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Indeks an-nasl menunjukkan bahwa tingkat kelahiran tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita penduduk tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireuen.

kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh. Berdasarkan Hasil penelitian ada enam kabupaten yang efisien dalam hal belanja bantuan sosial yaitu Pidie, Bireun, Aceh utara, Aceh Jaya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sedangkan 17 kabupaten/kota lainnya tidak efisien dalam hal belanja bantuan sosial program keluarga harapan. Belanja pemerintah (PKH) merupakan Hal yang sangat penting dalam hal

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji hubungan dana bagi hasil otonomi khusus dan dana bagi hasil pajak terhadap efisiensi belanja bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan di 23

meningkatkan komponen fundamental dari kesejahteraan masyarakat. Karena belanja melalui pembiayaan program keluarga harapan merupakan salah indicator utama dalam hal kebijakan publik untuk mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Kedepannya upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pengeluaran bantuan sosial ini perlu di perhatikan lebih teliti karena banyaknya data penerima bantuan sosial ini tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Komponen sumber daya manusia (IPM) yang paling rendah pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan. Investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang Pendidikan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dalam jangka pendek belum berdampak optimal terhadap kemiskinan pengurangan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan dan memperluas lingkup pelayanan pendidikan murah dan berkualitas (mulai dari Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi).

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ketersediaan data series yang lebih sedikit sehingga tidak bisa menggunakan model regresi analisis jangka Panjang dan menggunakan pendekatan model statis, kedua keterbatasan cakupan data sampel yang hanya terbatas di provinsi Aceh menggunakan data kabupaten/kota sehingga cakupan tidak lebih merata dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia

Saran

Saran diharapkan kepada penelitian selanjutnya mennggunakan data series yang lebih Panjang sehingga mengurangi dampak masalah-masalah asumsi dalam pengujian secara statistik. selanjutnya penelitian ini hanya berfokus di kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti di provinsi-provinsi lainnya terutama provinis miskin yang ada di pulau sumatera atau Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BAPEDA ACEH. (2018). LAKIP.D'Inverno, G., Carosi, L., & Ravagli, L. (2018). Global public spending efficiency in Tuscan municipalities. *Socio-Economic Planning Sciences*, 61, 102–113. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2017.01.006>

- Dana, D. A. N., Khusus, O., & Periode, A. (2020). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020 E-ISSN: 2615-126X* URL: http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional. 3, 23–31.
- Juliansyah, H., Dharma, Y., Zulfa, A., Asnawi, A., Aprilla, D., Umaruddin, U., Anwar, K., Fuadi, F., & Abbas, T. (2019). *Analysis of Economic Development Disparity across Regencies in Aceh, Indonesia*. 292(Agc), 677–682. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.101>
- Li, B., & Dewan, H. (2017). Efficiency differences among China's resource-based cities and their determinants. *Resources Policy*, 51(July 2016), 31–38. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.11.003>
- Paper, C. (2016). *Mengunakan Metode Data Envelopment Analysis (Dea). February 2015*, 0–16.
- Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance*, 5(2012), 615–622. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00072-5)
- Yanti, P., & Kustiani, N. A. (2016). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Urusan Kesehatan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Info Artha*, 4, 81–96. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i4.49>
- YU, L. rong, & LI, X. yun. (2021). The effects of social security expenditure on reducing income inequality and rural poverty in China. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 1060–1067. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63404-9](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63404-9)
- BPS. (2018). Provinsi Aceh Dalam Angka.
- Celikay, Ferdi, dan Erdal Gumus. 2017. “The effect of social spending on reducing poverty.” *International Journal of Social Economics* 44(5): 620–32.
- D'Inverno, G., Carosi, L., & Ravagli, L. (2018). Global public spending efficiency in Tuscan municipalities. *Socio-Economic Planning Sciences*, 61, 102–113. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2017.01.006>
- Dana, D. A. N., Khusus, O., & Periode, A.

- (2020). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020 E-ISSN: 2615-126X* URL: http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional. 3, 23–31.
- Juliansyah, H., Dharma, Y., Zulfa, A., Asnawi, A., Aprilla, D., Umaruddin, U., Anwar, K., Fuadi, F., & Abbas, T. (2019). *Analysis of Economic Development Disparity across Regencies in Aceh, Indonesia*. 292(Agc), 677–682. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.101>
- Li, B., & Dewan, H. (2017). Efficiency differences among China's resource-based cities and their determinants. *Resources Policy*, 51(July 2016), 31–38. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.11.003>
- Paper, C. (2016). *Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (Dea)*. February 2015, 0–16.
- Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance*, 5(2012), 615–622. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00072-5)
- Yanti, P., & Kustiani, N. A. (2016). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Urusan Kesehatan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Info Artha*, 4, 81–96. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i4.49>
- YU, L. rong, & LI, X. yun. (2021). The effects of social security expenditure on reducing income inequality and rural poverty in China. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 1060–1067. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63404-9](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63404-9)
- D'Inverno, G., Carosi, L., & Ravagli, L. (2018). Global public spending efficiency in Tuscan municipalities. *Socio-Economic Planning Sciences*, 61, 102–113. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2017.01.006>
- Dana, D. A. N., Khusus, O., & Periode, A. (2020). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020 E-ISSN: 2615-126X* URL: http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional. 3, 23–31.
- Juliansyah, H., Dharma, Y., Zulfa, A., Asnawi, A., Aprilla, D., Umaruddin, U., Anwar, K., Fuadi, F., & Abbas, T. (2019). *Analysis of Economic Development Disparity across Regencies in Aceh, Indonesia*. 292(Agc), 677–682. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.101>
- Li, B., & Dewan, H. (2017). Efficiency differences among China's resource-based cities and their determinants. *Resources Policy*, 51(July 2016), 31–38. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.11.003>
- Paper, C. (2016). *Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (Dea)*. February 2015, 0–16.
- Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance*, 5(2012), 615–622. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00072-5)
- Yanti, P., & Kustiani, N. A. (2016). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Urusan Kesehatan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Info Artha*, 4, 81–96. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i4.49>
- YU, L. rong, & LI, X. yun. (2021). The effects of social security expenditure on reducing income inequality and rural poverty in China. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 1060–1067. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63404-9](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63404-9)